

# MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA

Soeprapto\*)

*Perkenankan kami pada kesempatan ini mengutip pendapat Fritz Adler, yang disampaikan oleh Bung Karno dalam kursus Pancasila pada bulan Juli 1958, sekitar lima puluh tahun yang lalu, yang maknanya bahwa yang utama dibutuhkan rakyat pada umumnya, adalah tercukupinya makan, sandang dan papan untuk menunjang hidup mereka. Masalah peraturan perundang-undangan adalah nomor dua. Tepat sekali ungkapan para founding fathers yang tertera dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:*

*Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara itu baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak merintanginya negara. Jadi yang paling penting adalah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis.*

Penjelasan UUD tersebut menekankan bahwa yang lebih penting adalah akhlak dan sikap serta perilaku para penyelenggara negara dan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Berebut merumuskan penyusunan peraturan perundang-undangan saja, tidak bermakna bila tidak dilandasi oleh niat para

penyelenggara negara dan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukan etos hidup menegara bagi para penyelenggara negara. Bila para penyelenggara negara yang dipikirkan adalah perutnya sendiri, peraturan yang sebaik apapun tidak ada maknanya dan tidak

---

\*) Ketua LPPKB

akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

### Tujuan berdirinya suatu Negara

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap sepak terjang para penyelenggara negara dan pemerintahan serta para elit politik ada baiknya kalau kita tengok sejenak apa tujuan sebenarnya suatu negara didirikan. Dengan sengaja kami utarakan sebagai bahan banding suatu negara adidaya yakni Amerika Serikat, sebagai negara yang dewasa ini selalu dipergunakan sebagai acuan oleh beberapa negara yang sedang berkembang.

Bagi rakyat Amerika, cita-cita yang diharapkan dengan berdirinya Negara Amerika Serikat tertera dalam konstitusinya yang berbunyi sebagai berikut:

*We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessing of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.* (cetak bold oleh penulis).

Bila diterjemahkan secara bebas kira-kira sebagai berikut: "Kami rakyat Amerika Serikat,

dalam rangka menciptakan kesatuan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin kesenangan keluarga, penyediaan pertahanan umum, meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin berkah kemerdekaan bagi kita sendiri maupun bagi keturunan kita, mentasbihkan dan menyusun Konstitusi ini bagi Negara Amerika Serikat." Tujuan ini merupakan penjabaran dari Deklarasi Kemerdekaannya, yang diantaranya: "pengakuan terhadap kesetaraan manusia, dan manusia dikaruniai hak asasi berupa *life, liberty, and the pursuit of happiness*.

Nampak sekali bahwa yang diinginkan oleh rakyat Amerika Serikat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan, serta terjaminnya keamanan dan kesenangan dalam kehidupan. Dengan sendirinya konsep keadilan, kesejahteraan sesuai dengan pandangan rakyat Amerika yang menganut paham individualisme yang liberalistis. Untuk mencapai cita-citanya berbagai usaha dilakukan, dan dikembangkan berbagai pendekatan dan metoda untuk mencapainya.

Marilah kita bandingkan dengan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau kita cermati maka tujuan yang hendak diwujudkan oleh rakyat Indonesia dengan berdirinya negara hampir sama dengan apa yang tertera dalam konstitusi Amerika Serikat, namun dasar atau konsep dasar yang melandasinya berbeda. Kalau Amerika Serikat melan-

daskan diri pada konsep individualisme liberalistik yang sekuler, Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila yang bersifat religius sosialistik, sehingga pendekatan dan metoda dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan mungkin sangat berbeda dengan pola yang diterapkan di Amerika.

Bila kita cermati lebih lanjut ternyata hampir semua negara selalu memiliki tujuan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan suatu negara yang dapat memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang adil pada masyarakat atau rakyatnya. Kita kenal *welfare state* yang ingin diwujudkan oleh Swedia dan negara-negara Eropa Utara, *welfare state* yang ingin diwujudkan oleh Inggris dan Amerika, serta negara yang ingin mewujudkan kemakmuran ala komunis seperti yang diusahakan oleh Uni Soviet dan RRC.

Terdapat beberapa perkara yang menjadi perhatian manusia dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga akan tercukupi segala kebutuhan hidupnya secara berkeadilan. Perkara-perkara yang menjadi perhatian manusia tersebut di antaranya: (a) Bagaimana negara dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dijadikan arena bagi warganegara untuk mendapatkan penghasilan yang layak

untuk menunjang hidupnya dengan sejahtera dan dalam berkeadilan. Makin sedikit warganegara suatu negara yang tidak memperoleh pekerjaan makin menunjukkan kesejahteraan negara tersebut. Yang ingin diciptakan adalah masyarakat yang kecukupan dan berlimpahnya kebutuhan penunjang hidup manusia, yang oleh John Kenneth Galbraith disebut sebagai *affluent society*. Dengan demikian kemiskinan akan tereliminasi; (b) Bagaimana negara dapat mengatur kelebihan hasil usaha, atau nilai tambah yang dihasilkan oleh proses produksi dan jasa secara adil kepada seluruh rakyat. Bagaimana *transfer payment* dapat diatur dengan berkeadilan; (c) Bagaimana negara mengatur pelayanan publik seperti terselenggaranya pendidikan dengan memuaskan, pelayanan kesehatan pada rakyat, jaminan hari tua dan bagi rakyat yang lemah, serta tersedianya prasarana dan sarana yang akan memberikan kemudahan bagi kehidupan; (d) Bagaimana negara mengatur kebebasan dan kesetaraan berekspresi warganegaranya, sehingga terjamin rasa aman dan tenteram dalam melaksanakan tugas hidup warganegara; (e) Bagaimana mewujudkan rasa adil, hukum ditegakkan, kesamaan kedudukan di depan hukum, konstitusionalis-

me ditegakkan, keamanan terpelihara.

Demikian hal-hal yang selalu menjadi perhatian para pemikir-pemikir dunia, para penyelenggara negara dan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Marilah kita mencoba untuk menelusuri perjalanan umat manusia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pola pikir masing-masing.

## **Pola-pola Upaya Mewujudkan Kesejahteraan**

### **Faham Kapitalis-liberalis**

Dengan bertitik tolak pada asumsi bahwa kesejahteraan merupakan tanggung jawab setiap individu untuk merealisasikannya, dan dengan mengacu pada hukum alam bahwa Tuhan telah memberikan bekal pada manusia untuk mempertahankan eksistensi diri, maka berkembanglah konsep kesejahteraan yang bersifat individualistik dan liberalistik. Konsep ini dikembangkan di antaranya oleh Adam Smith, seorang pakar ekonomi dan filsafat bangsa Skotlandia yang hidup di abad ke 18 (1723 - 1790). Sebagai seorang filsuf, dan sebagai guru besar dalam bidang *moral philosophy* di Glasgow, pada tahun 1759 menulis buku yang terkenal

dengan judul *Theory of Moral Sentiment*, menekankan pada simpati kepentingan pribadi yang merupakan kekuatan asasi dari sifat manusia. Baru sekitar 20 tahun kemudian, pada tahun 1776, ia menulis buku yang sangat terkenal, *An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nation*, yang biasa disebut-sebut sebagai sumber ekonomi klasik. Sangat mungkin pemikiran A. Smith dipengaruhi oleh gagasan-gagasan John Locke, Montesquieu dan David Hume. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Smith di antaranya: (a) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serahkan pada hukum pasar, *supply and demand*. Pasar akan mengatur dengan sendirinya proses permintaan dan penyediaan, yang akan membawa ke arah keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Gagasan ini yang melahirkan semboyan yang sangat terkenal: "*Laissez faire, laissez passer, et le Monde va de lui meme.*" (b) Negara tidak perlu intervensi dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Biarkan pasar mengatur dengan sendirinya; (c) Dengan sistem ini, pasar bebas, kepentingan pribadi dijamin, lapangan kerja tersedia, akumulasi modal tercipta, sehingga proses produk-

si akan terselenggara secara alami; (d) Gagasan ini melahirkan persaingan bebas sesuai dengan prinsip *survival of the fittest*.

Pandangan Adam Smith ini masih berpengaruh sampai dewasa ini meskipun telah terdapat beberapa pandangan lain yang berusaha untuk mengantisipasi atau menyempurnakannya. Diakui gagasan Adam Smith, terdapat kelemahan dalam implementasinya.

Salah satu kelemahan teori A. Smith adalah tidak meratanya atau katakanlah kurang adilnya pendistribusian nilai tambah atau *added value* sebagai hasil proses produksi dan jasa. Hal ini disebabkan karena potensi yang dimiliki oleh setiap manusia tidak sama, terdapat perbedaan individual yang mengakibatkan kemampuan untuk memproduksi dan berprestasi berbeda-beda. Untuk dapat lebih pemeratakan hasil usaha, *added value*, maka pemerintah perlu mengadakan intervensi terhadap kehidupan ekonomi. Berkembanglah berbagai upaya untuk memperbaikinya.

## Faham Sosialisme

Konsep yang dikembangkan oleh Adam Smith dengan pasar bebas tersebut, yang biasa disebut sebagai ekonomi klasik melahirkan sekelompok kecil, pemilik

modal, yang dapat menikmati hasil produksi dengan melimpah ruah, dan sebagian besar masyarakat yang hidup pas-pasan saja dalam taraf *basic subsistence*, yakni terpenuhi kebutuhan dasar, sekedar untuk menunjang hidup sehingga mampu memproduksi. Bahkan yang lebih besar lagi dari masyarakat hidup dalam kemiskinan. Masyarakat terpolarisasi yang oleh Karl Marx disebut sebagai kaum borjuis, yakni kaum pemilik modal, dan kaum proletar, yakni kaum buruh yang tidak memiliki apa-apa. Situasi semacam ini merisaukan masyarakat, sehingga lahirlah pemikir-pemikir untuk menemukan sistem baru untuk meniadakan dampak negatif dari sistem pasar bebas tersebut. Di antara pemikiran tersebut adalah faham sosialisme.

Faham sosialisme yang kelahirannya hampir bersamaan dengan faham kapitalis liberalistik, berangkat dari suatu asumsi bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, *zoon politicon*, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Manusia selalu hidup dalam berkawan, sehingga manusia dalam mengejar kesejahteraan bagi dirinya harus selalu memperhatikan juga kesejahteraan bagi teman-teman

hidupnya.

Dalam garis besarnya faham sosialisme terbagi dalam dua aliran, yakni aliran yang moderat, yang didukung oleh kaum sosialis demokrat, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat untuk semua pihak, dengan bersemboyan "*good life*," dengan memperjuangkannya lewat parlemen, tanpa harus mengadakan pertumpahan darah. Sedang aliran kedua dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dan diimplementasikan di Rusia oleh Lenin (1870 - 1924), yang waktu mudanya bernama Vladimir Ilich Ulyanov, dengan faham komunisme. Faham kapitalis yang liberalistik menciptakan ketidakadilan masyarakat dalam menikmati hasil usaha di bidang ekonomi, oleh karena itu perlu dirombak secara total dengan mengadakan revolusi. Negara didudukkan sebagai penyelenggara perekonomian, negara pengatur segala hal ihwal yang berkaitan dengan usaha mensejahterakan rakyat. Dikembangkan semboyan "sama rasa sama rata". Setiap individu bekerja sesuai dengan peran, fungsi dan kedudukannya, sedang negara yang mengatur pembagian nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi. Ternyata sistem inipun hanya menghasilkan sistem totaliter, sehingga hanya memberikan kesejahteraan lebih

kepada para penguasa, sebagai akibat pada akhir abad ke XX mengalami kehancuran.

### Faham Neo-liberalisme/Neo-klasik

Dengan munculnya faham sosialisme, kaum liberalis, untuk tetap menjaga eksistensinya, berusaha memperbaiki kekurangan sistem liberalisme dengan memikirkan bagaimana membagi nilai tambah yang dihasilkan oleh proses produksi. Dicari pola yang mampu mengakomodasi pemikiran kapitalis liberal dan faham sosialis. Terjadilah pola baru yakni konsep negara kesejahteraan yang oleh Gunnar Myrdal disebut sebagai "*liberalized socialism*," atau "*socialistically inclined liberalism*." Berkembanglah konsep "*transfer payment*," yakni upaya untuk memotong perolehan mereka yang didapatkan dari nilai tambah dalam proses produksi yang berlebihan untuk membagikan kepada mereka yang kurang atau belum mendapatkan bagian dari hasil nilai tambah tersebut. Konsep ini tumbuh berdasar suatu pemikiran bahwa para pemodal dapat menikmati hasil produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bersama atau dimiliki negara, sehingga semua warganegara pantas untuk ikut menikmatinya. Cara untuk merealisasikan *transfer*

*payment* tersebut, di antaranya dengan membentuk negara kesejahteraan atau *welfare state* dengan pola-pola sebagai berikut:

#### a. Sistem Negara Eropa Utara

Pola negara kesejahteraan ini diterapkan di Swedia dan negara Eropa Utara lainnya, dengan memberi nama *the sosial welfare state*. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *social welfare state* adalah: (1) menciptakan persamaan, kerjasama atau koperasi, solidaritas dan persaudaraan dalam proses produksi; (2) lapangan kerja diciptakan bersama antara pemerintah dan para pekerja sendiri; (3) masyarakat dengan sendirinya akan mengalami transformasi terus menerus menuju kondisi yang lebih baik; (4) perencanaan pembangunan dikerjakan dengan bersendi pada wawasan lingkungan dan kelestarian lingkungan; (5) diusahakan perbedaan pendapatan dari yang atas dan bawah dipersempit. Bentuk usaha yang paling tepat adalah koperasi.

#### b. Sistem Inggris

Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, negara Inggris menerapkan *the social security state*, dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Negara menjaga pertumbuhan ekonomi secara makro seperti yang terjadi pada negara penga-

nut paham sosialis; (2) Negara menyelenggarakan Badan Usaha Milik Negara untuk mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; (3) Negara secara komprehensif menyelenggarakan asuransi sosial bagi warganegara; (4) Negara berusaha untuk meningkatkan derajat hidup warganegara dengan menghapus *basic subsistence*, hidup pas-pasan; (5) Semboyan yang dikemukakan: "*the poor will always be with us.*"

### c. Sistem Amerika

Amerika Serikat memberikan nama pola negara kesejahteraan yang dikembangkan di negaranya *the positive welfare state*, yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Roosevelt. Adapun ciri *the positive welfare state* adalah (1) Sektor swasta yang semula berperan begitu penting dalam perekonomian, mulai dibatasi oleh peran negara dalam mengatur usaha; (2) Sektor swasta tetap mengendalikan pasar, penyediaan lapangan kerja dengan berkolaborasi dengan pemerintah; (3) *Transfer payment* diselenggarakan dengan pengaturan pajak progresif; (4) Penganggur, anak cacat dan para lanjut usia menjadi urusan negara.

Demikianlah gambaran sistem ekonomi kapitalis yang telah

mengalami perubahan yang sangat berarti, tidak seperti yang digambarkan oleh Karl Marx pada awal abad ke XX. Namun demikian bagi bangsa Indonesia masih perlu mempertanyakan, apakah sistem ekonomi pasar liberal ini cocok bagi pengaturan perekonomian di Indonesia, yang memberikan jaminan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Perlu kita cermati bahwa sampai dewasa ini dirasakan bahwa pendekatan neo-klasik kurang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan berdasarkan nilai keadilan yang akan mewujudkan disparitas terendah. Marilah kita menelusuri usaha anak bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

### Masa Pemerintahan Presiden Soekarno

Masa pemerintahan presiden Soekarno dapat dibagi dalam tiga periode yakni periode 1945 - 1950, periode 1950 - 1959, dan periode 1959 - 1967. Secara singkat kami uraikan apa yang telah diperbuat oleh pemerintahan presiden Soekarno pada kurun waktu tersebut.

Pada periode pertama, pemerintahan presiden Soekarno belum dapat berbuat banyak berkaitan dengan mensejahterakan rakyat, karena sebagian besar tenaga masih dipusatkan untuk

tetap menjaga eksistensi negara. Eforia kemerdekaan menumbuhkan semangat pada rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan, sehingga tidak risau terhadap masalah kesejahteraan. Dengan berbekal "*Jer basuki mawa beya*," dan "*Sepi ing pamrih rame ing gawe*," rakyat berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Rakyat dengan rela menyumbangkan apa yang dapat disumbangkan bagi kepentingan perjuangan dan tidak menuntut terwujudnya kesejahteraan baginya.

Memasuki periode kedua, pemerintah mulai memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat dapat diusahakan. Namun pola pemerintahan parlementer berakibat terjadinya perebutan kekuasaan antar partai politik tidak henti-hentinya sehingga kesejahteraan rakyat belum menjadi prioritas perjuangan. Yang dikejar adalah untuk mendapat kekuasaan, dan untuk dapat menikmatinya. Pemerintahan yang selalu berganti perdana menteri tidak sempat berbuat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Baru setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan presiden Soekarno mulai menyusun rencana pembangunannya, yang disebutnya Manifesto Politik, yang isinya di antaranya adalah untuk mem-

buat kesejahteraan rakyat dengan pola sosialisme Indonesia. Namun karena adagium yang berkembang pada waktu itu "politik adalah panglima," maka usaha kesejahteraan rakyat tersebut terlalu bernuansa politis, kurang bermuatan ekonomis. Akibatnya terjadilah keterpurukan ekonomi yang sangat akut, yang berakibat rakyat sangat menderita.

Prof Dr. Emil Salim memberikan ilustrasi mengenai merosotnya perekonomian, dengan membandingkan kondisi tahun 1960 dan tahun 1966 adalah sebagai berikut: (a) biaya hidup naik 438 kali, (b) harga beras naik 824 kali, (c) harga tekstil 717 kali, (d) harga tukar dollar dari Rp.160,- menjadi Rp.120.000,-. Inflasi pada tahun 1966 tercatat sekitar 650 %. Dapat kita bayangkan betapa beratnya penderitaan rakyat pada waktu itu.

### **Masa Pemerintahan Presiden Soeharto**

Dengan mendapatkan warisan dari pemerintahan sebelumnya, berupa kondisi perekonomian negara yang sangat memprihatinkan, Presiden Soeharto tidak mencari kambing hitam. Setelah keamanan dapat ditegakkan sebagai akibat dari G-30-S, Presiden Soeharto mulai mengadakan konsolidasi, dan

mulai merancang mengadakan pembangunan untuk dapat menyejahterakan rakyat. Konsep pembangunan dirancang dengan kebijakan yang disebut trilogi pembangunan, stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Konsep ini sangat mendasar, tidak mungkin pembangunan perekonomian diselenggarakan dalam situasi keamanan yang kacau dan tidak stabil, sehingga masalah keamanan menjadi landasan utama berlangsungnya pembangunan. Keadaan ini yang oleh berbagai pihak disebut sebagai pendekatan keamanan, atau *security approach*, yang menuduh pemerintahan presiden Soeharto bersifat totaliter. Di samping itu pemerataan kesejahteraan tidak mungkin tanpa adanya yang dirasakan, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mutlak agar dapat diselenggarakan pemerataan pendapatan yang mensejahterakan rakyat.

Implementasi trilogi pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat pembangunan diselenggarakan. Pada awal diselenggarakan pembangunan dirasa stabilitas keamanan kurang kondusif bagi terlaksananya pembangunan, sehingga pada tahap pertama penekanan pembangunan diletakkan pada stabili-

tas. Namun setelah kondisi keamanan dinilai cukup stabil maka titik berat pembangunan diletakkan pada pertumbuhan ekonomi. Investasi digalakkan, perindustrian, pertanian, pertambangan dikembangkan secara optimal dengan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Baru setelah pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan yang meyakinkan maka program pemerataan menjadi titik berat dalam pembangunan. Dikembangkan program delapan jalur pemerataan, yaitu: (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan perumahan; (2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) Pemerataan pembagian pendapatan; (4) Pemerataan kesempatan kerja; (5) Pemerataan kesempatan berusaha; (6) Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya generasi muda dan kaum wanita; (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan terwujudnya stabilitas keamanan, maka menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modal di Indonesia, sehingga berkembanglah industrialisa-

si di berbagai daerah. Sebagai akibat terjadi lapangan kerja baru; sampai tahun 1990-an telah tercipta sekitar 44 juta lapangan kerja baru yang akan memberikan penghidupan pada rakyat. Dengan dibangunnya industri yang dapat menikmati kesejahteraan bukan hanya para buruh yang ditampung menjadi pekerja di pabrik, tetapi memberikan kehidupan pada sekitar pabrik, seperti tumbuhnya warung nasi yang menyediakan makan bagi para pekerja, berbagai usaha jasa seperti transportasi, perbengkelan dan sebagainya. Suatu contoh dengan berkembangnya pabrik Gudang Garam di Kediri, dari pihak pabrik tidak menyediakan jemputan tetapi memberikan biaya transportasi, untuk dapat mempergunakan becak. Sebagai akibat tumbuhlah puluhan ribu tukang becak yang mendapatkan penghidupan dari kebijakan ini. Program ini yang disebut sebagai pendekatan "*trickle down effect*." Meskipun terdapat pihak-pihak yang menyangsikan keberhasilan pendekatan ini, namun dalam batas-batas tertentu sudah dapat kita lihat juga dampaknya pada masyarakat.

Setelah perekonomian mulai nampak stabil, dan pertumbuhannya meyakinkan, bangsa Indonesia mulai mendapat kepercayaan dari para donor pin-

jaman dari luar negeri. Pinjaman tersebut diutamakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi. Jalan-jalan diperbaiki dan dikembangkan, bendungan dibangun dengan pembangkit listrik dan saluran irigasinya, pabrik pupuk didirikan, sehingga hasil pertanian meningkat, distribusi produksi berjalan lancar, yang kesemuanya itu memberikan kesejahteraan pada rakyat.

Jalan-jalan sampai ke pelosok telah diaspal, jembatan dibangun sehingga memungkinkan kendaraan bermotor menjangkau sampai ke pelosok. Dengan telah bagusnya jalan tersebut terjadi anekdot di Jawa Tengah bagian selatan. Semula transportasi di daerah pedalaman mempergunakan dokar atau sado, tetapi dengan baiknya jalan berganti menjadi kendaraan bermotor, maka pada waktu gubernur berkunjung ke daerah terbut, para kusir dokar menuntut kepada gubernurnya, karena kalah bersaing dengan supir angkutan umum, dan minta agar kendaraan bermotor tidak masuk wilayahnya.

Dengan program listrik masuk desa televisi tidak hanya dinikmati oleh orang kota, tetapi di puncak gunungpun rakyat dapat mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh stasiun televisi. Dalam rangka men-

cerdaskan kehidupan bangsa, dirancang program pendidikan yang spektakuler, meskipun pelaksanaannya kadang-kadang belum seperti yang diharapkan. Suatu contoh pada tahun 1970 anak usia sekolah yang dapat terdampung di sekolah dasar baru sekitar 65%, ditambah *drop outs* begitu tinggi sekitar 65% juga, sehingga yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar enam tahun di bawah 30%. Melihat kondisi yang semacam ini maka perlu diadakan *crash program* pendidikan dasar yang disebut mendirikan Sekolah Dasar Inpres. Dengan kemampuan yang ada pada waktu itu, pada tahun 1973 - 1974 dibangun 15.000 sekolah dasar suatu program yang fantastik. Suatu program yang memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit untuk membangun gedung sekolah, sarana dan prasarana, buku, penyediaan guru dan sebagainya.

Kesejahteraan rakyat tergantung juga pada pertumbuhan penduduk. Bila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, pertumbuhan ekonomi tidak akan mungkin memberikan kesejahteraan rakyat yang tumbuh dengan cepat. Untuk menekan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali diselenggarakan program keluarga berencana. Hasilnya sangat mengesankan, dari pertumbuhan penduduk di

atas 2,5% dapat ditekan menjadi sekitar 1,5% saja, bahkan di berbagai daerah telah terjadi pertumbuhan penduduk yang stabil.

Suatu realitas yang dapat kita amati bahwa sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan hingga masa awal pembangunan, pertumbuhan penduduk mengikuti pola dunia yang bersifat eksponensial atau berpangkat. Pertumbuhan eksponensial adalah pola pertumbuhan penduduk yang akan menyerap habis hasil pertumbuhan ekonomi atau pembangunan. Keberhasilan pemerintahan presiden Soeharto dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, merupakan wujud dan hasil pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan realistis akan hubungan antara upaya pembangunan dan kesejahteraan nyata bagi setiap penduduk sebagai warga masyarakat.

Begitu banyak hal yang telah diusahakan oleh pemerintahan presiden Soeharta dalam mensejahterakan rakyat, yang tidak dapat diungkap di sini. Untuk memberikan bukti secara nyata, beberapa angka dan indikator perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran dimaksud. Namun tidak dapat diingkari bahwa masih banyak pula hal-hal yang belum dapat diselesa-

iakan oleh pemerintahan presiden Soeharto. Ditambah lagi bahwa setiap pembangunan pasti memiliki efek samping, terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang bermuara pada terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **Masa Pemerintahan Reformasi**

Selama masa reformasi, sejak 1998 sampai 2006, telah terjadi pergantian presiden empat kali, sehingga masa bhakti masing-masing presiden sangatlah pendek, sehingga belum nampak hasil usahanya dalam menyejahterakan rakyat. Sementara itu dengan perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi bertugas untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara, sehingga tidak nampak dengan jelas apa yang hendak dicapai oleh negara pada lima tahun mendatang, apalagi untuk jangka panjang. Dengan tanpa adanya blue print pembangunan agak sukar untuk menilai keberhasilan pembangunan.

Meskipun demikian telah terdapat beberapa pakar dan lembaga swasta yang berusaha untuk mencari solusi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan dasar negaranya dan diharapkan dapat mengantisipasi merebaknya globalisasi. Dapat dikemukakan di antaranya Prof. Dr. Mubyarto dari Universitas Gajah Mada

mengemukakan sistem "ekonomi kerakyatan," dr. Sulastomo dkk. mengusulkan sistem "ekonomi pasar sosial terbuka," sedang LPPKB mengusulkan "*social justice welfare state.*" Gagasan-gagasan tersebut perlu dikembangkan terus, sehingga dapat menjadi pola solusi krisis ekonomi yang melanda negarabangsa.

Mudah-mudahan dengan dipilihnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung dari rakyat, mampu memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menyejahterakan rakyat. Untuk itu rakyat wajib mendukungnya.

### **Rujukan**

1. Encyclopedia International
2. Ensiklopedi Politik Pembangunan Indonesia
3. Majalah Tokoh Indonesia, Volume 24
4. Soekarno, Ir., *Tjatkan Pantja Sila*, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, Editor H. Amin Arjoso, SH.
5. Soeprapto, et al., *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, LPPKB, 2006.
6. Syafaat Habib, *Memperkuat Sistem Politik Ekonomi Nasional Menghadapi Fenomena Akibat Globalisasi*, LPPKB, 2006.